

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi yang umum terjadi di berbagai negara, baik yang telah maju maupun yang sedang berkembang. Perbedaannya tercermin dari tingkat intensitas ketimpangan yang dialami setiap wilayah, di mana masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kesenjangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Ketimpangan pendapatan umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga manfaat dari proses pembangunan belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata (Salsavira & Ririt Iriani Sri Setiawati, 2025).

Menurut *World Bank* (2015) ketimpangan dipacu oleh sejumlah elemen struktural yang saling bersinggungan, diantaranya ialah keterbatasan kesempatan awal yang dialami oleh kelompok miskin sehingga akses terhadap pendidikan dan pekerjaan menjadi tidak merata. Perbedaan tingkat keterampilan juga dapat menyebabkan ketidakmerataan pendapatan, di mana tenaga kerja yang memiliki kapabilitas tinggi condong akan mendapat upah yang lebih besar dibandingkan dengan praktisi di sektor informal dengan produktivitas rendah. Selain itu, konsentrasi kepemilikan aset pada kelompok tertentu serta tingginya kerentanan masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi yang menurunkan kemampuan mereka dalam memperoleh pendapatan semakin memperkuat tingkat ketimpangan pendapatan.

Permasalahan tersebut menekankan bahwasannya ketimpangan tidak sekedar berfokus pada perbedaan taraf pendapatan, melainkan juga menunjukkan adanya

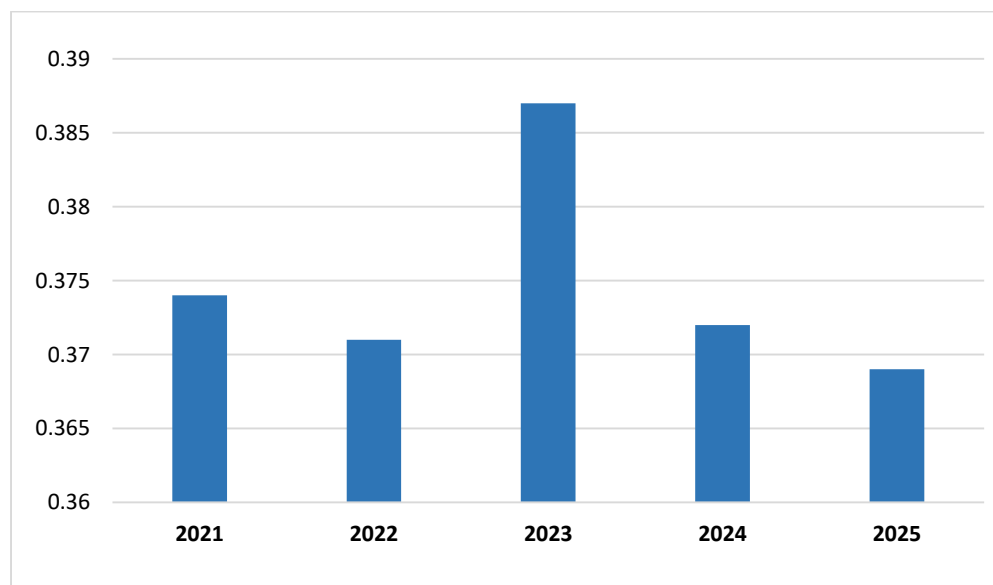
ketidakseimbangan struktur pembangunan yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan multidimensional apabila tidak ditangani secara tepat sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan multidimensional apabila tidak ditangani secara tepat sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan wilayah secara keseluruhan (Rahman, 2024; Anwar, Rorong and Tolosang, 2023). Ketimpangan pendapatan tidak sekedar timbul pada jenjang nasional saja, namun juga meluas hingga ke jenjang provinsi dan kawasan regional. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan pembangunan antarwilayah yang ditunjukkan melalui variasi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya menggambarkan prosedur berkelanjutan untuk membangun kondisi perekonomian masyarakat yang lebih optimal berbanding dengan kondisi lampau (Aditiya, 2021). Menurut Todaro dan Smith, pembangunan ekonomi umumnya dipahami sebagai proses yang dinamis dan multidimensional yang mempunyai tujuan untuk menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif (Toliu, Walewangko and Sumual, 2025). Dalam perkembangannya, konsep pembangunan ekonomi tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan output dan laju ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi pendapatan sebagai upaya menjaga stabilitas sosial serta keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi menjadi tolak ukur yang penting dalam mengukur keberhasilan kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah di berbagai negara.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, salah satu diantaranya adalah masalah

ketidakseimbangan pendapatan. permasalahan ini telah menjadi perhatian utama dalam kajian ekonomi dan perumusan kebijakan publik di berbagai negara, karena peningkatan ketimpangan dapat menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan diantara golongan pendapatan tinggi dengan golongan pendapatan rendah (Atmaji, 2023).

Dalam konteks provinsi, masalah ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan luas wilayah sebesar 47,693 km² dan secara administratif wilayah ini terpecah menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan kota Surabaya yang berperan selaku ibukota provinsi (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, 2024).



Gambar 1. 1 Gini Rasio Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data Gini Rasio di atas, bahwasanya tingkat kesenjangan distribusi pendapatan Provinsi Jawa Timur cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2021, Gini Rasio

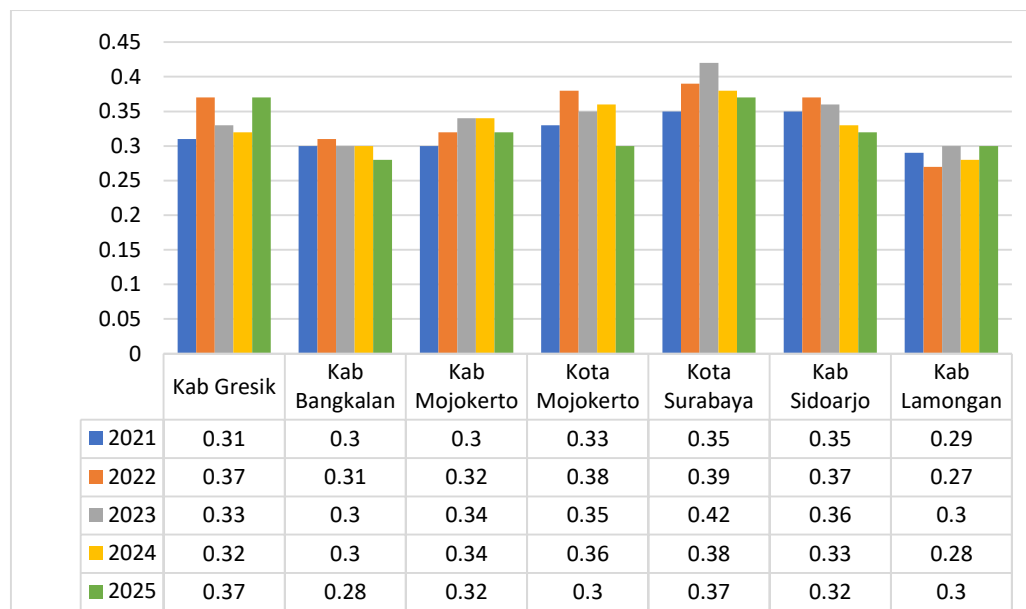
Jawa Timur memiliki nilai sebesar 0.374, selanjutnya menunjukkan tren penurunan menjadi 0.371 di tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai gini mengalami peningkatan menjadi 0.387, dimana nilai ini merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Kemudian nilai Gini Rasio kembali turun menjadi 0.372 di tahun 2024 dan 0.369 di tahun 2025.

Ketimpangan pendapatan yang timbul di Provinsi Jawa Timur dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan karakteristik geografis, ekonomi, sosial dan budaya antarwilayah. Selain itu, distribusi sumber daya yang tidak merata serta perkembangan pusat perdagangan dan industri yang cenderung mengacu pada wilayah tertentu menyebabkan terjadinya perbedaan aktivitas ekonomi antar kabupaten/kota. Kondisi tersebut berdampak pada perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat antarwilayah sehingga mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur (Fitriyah and Rachmawati, 2013).

Dalam konteks regional, ketimpangan pendapatan menjadi salah satu permasalahan struktural yang terjadi di Kawasan Gerbangkertosusila. Gerbangkertosusila merupakan kawasan metropolitan di Provinsi Jawa Timur dengan Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan perekonomiannya, serta didukung oleh beberapa unit penyangga yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan. Kawasan ini mempunyai kontribusi signifikan dalam mendorong aktivitas perekonomian Provinsi Jawa Timur khususnya melalui sektor industri, perdagangan dan jasa (Republik Indonesia, 2022).

Gerbangkertosusila merupakan salah satu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Provinsi Jawa Timur yang dibentuk sebagai upaya regionalisasi

pembangunan dengan menekan kemandirian dan keterpaduan antarwilayah kabupaten/kota dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional (Fitriyah and Rachmawati, 2013). Keberadaan kawasan ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, perkembangan ekonomi yang cenderung didominasi oleh wilayah tertentu sehingga menimbulkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota di Kawasan Gerbangkertosusila.



Gambar 1. 2 Gini Rasio Kawasan Gerbangkertosusila

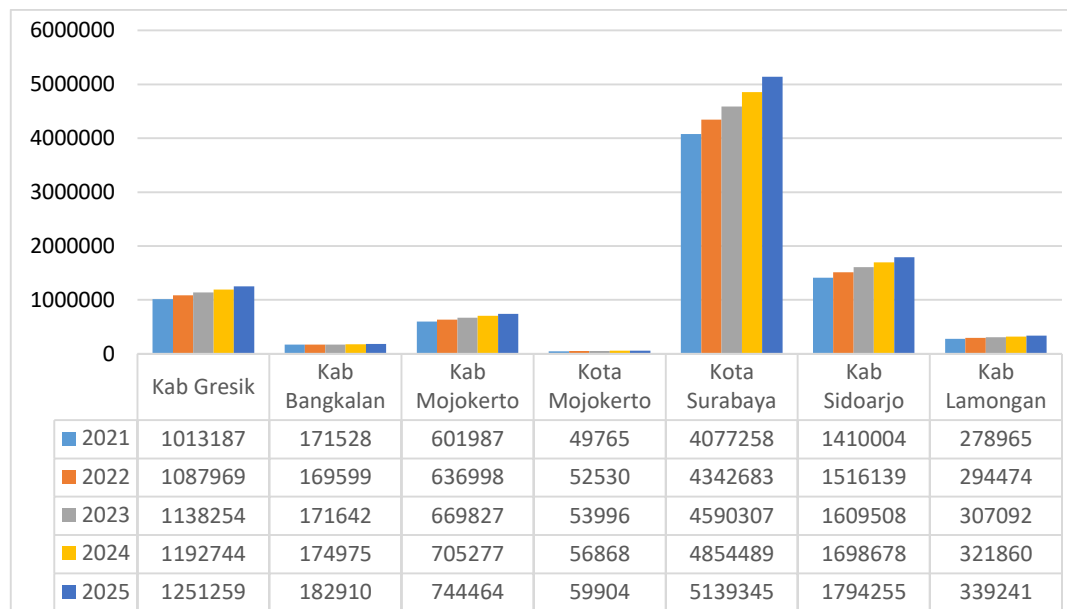
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada grafik Gini Rasio Kawasan Gerbangkertosusila tahun 2021 hingga 2025 terlihat adanya perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah. Kota Surabaya menjadi wilayah mencatat tingkat ketimpangan tertinggi dengan nilai Gini sebesar 0.42, sedangkan Kabupaten Lamongan memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah antara 0.28 hingga 0.30. Perbedaan nilai indeks tersebut menunjukkan

adanya konsentrasi aktivitas ekonomi dan akumulasi modal yang masih terpusat wilayah tertentu, khususnya Kota Surabaya sebagai pusat perekonomian di Jawa Timur. Kondisi tersebut menyebabkan hasil pertumbuhan ekonomi tak kunjung dinikmati secara menyeluruh oleh masyarakat pada daerah di sekitarnya (Salsavira and Ririt Iriani Sri Setiawati, 2025).

Hal ini memberikan gambaran bahwa ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dipacu oleh berbagai aspek ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat ketimpangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan adanya variasi dalam aktivitas ekonomi, kesempatan kerja serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi pokokutama karena dianggap sebagai salah satu determinan kesuksesan pembangunan ekonomi. Namun, kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai oleh penyebaran distribusi pendapatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu tolok ukur yang dipakai untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya PDRB merepresentasikan kinerja daerah dalam memanifestasikan barang dan jasa serta menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi yang dicapai (Manihuruk and Suhariato, 2026). Dalam konteks kawasan Gerbangkertosusila, PDRB memiliki peran yang penting karena kawasan ini merupakan pusat kegiatan perekonomian sekaligus penyumbang terbesar terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur. Tingginya aktivitas ekonomi di kawasan ini menjadikan Gerbangkertosusila sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional.



Gambar 1. 3 PDRB ADHK Kawasan Gerbangkertosusila

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan PDRB kawasan Gerbangkertosusila selama lima tahun belakangan memperlihatkan tren peningkatan pada seluruh kabupaten/kota. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian di masing-masing wilayah mengalami pertumbuhan secara riil antarperiode. Kota Surabaya memiliki nilai PDRB paling tinggi dimana pada tahun 2021 PDRB Kota Surabaya berada pada angka 4.077.258 miliar kemudian meningkat menjadi 5.139.345 miliar di tahun 2025.

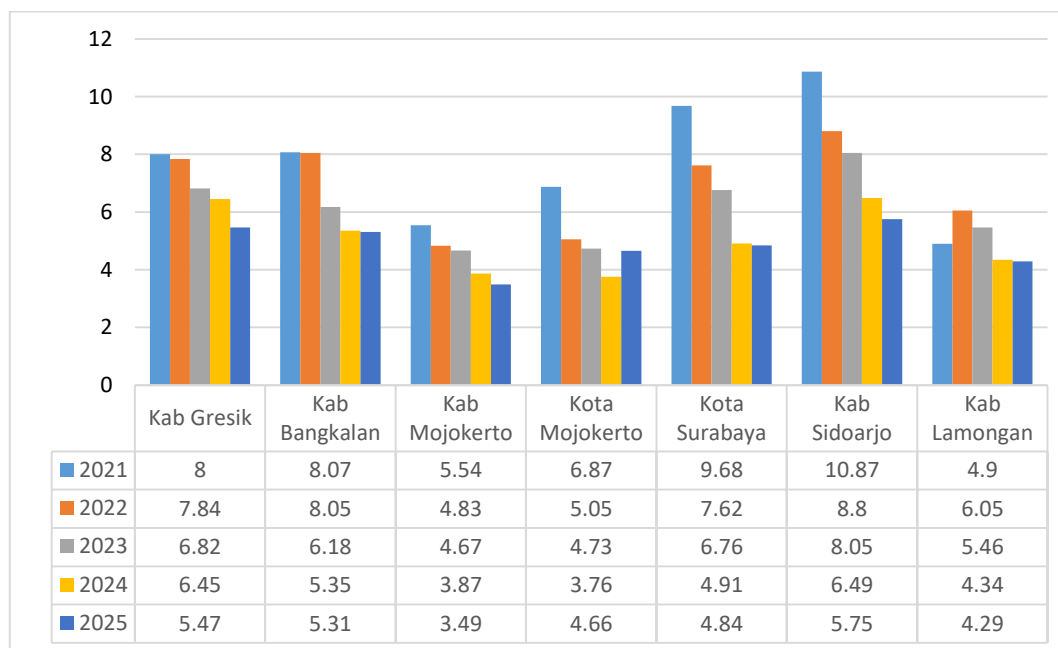
PDRB Kabupaten Sidoarjo meningkat dari 1.410.004 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 1.794.255 miliar rupiah. Selanjutnya Kabupaten Gresik menempati posisi ketiga dimana PDRB daerah ini mengalami peningkatan dari 1.031.817 miliar meningkat menjadi 1.251.259 miliar rupiah pada kurun waktu yang sama kedua wilayah ini memiliki peran sebagai kawasan industri dan perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional

Sementara itu, Kabupaten Mojokerto mencatat peningkatan PDRB dari 601.987 miliar rupiah di tahun 2021 yang kemudian berubah menjadi 744.464 miliar tahun 2025. Kabupaten Lamongan juga mengalami kenaikan dari 278.965 miliar rupiah menjadi 339.241 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Bangkalan meningkat dari 171.528 miliar rupiah menjadi 182.910 miliar rupiah. Meskipun mengalami pertumbuhan, besaran PDRB ketiga wilayah tersebut masih berada di bawah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Di sisi lain, Kota Mojokerto merupakan daerah dengan nilai PDRB ADHK paling rendah selama periode pengamatan. Nilainya meningkat secara bertahap dari 49.765 miliar rupiah di tahun 2021 menjadi 59.904 miliar rupiah di tahun 2025. Rendahnya nilai PDRB Kota Mojokerto dibandingkan daerah lainnya dipengaruhi oleh luas wilayah yang relatif kecil serta skala aktivitas ekonomi yang lebih terbatas.

Secara keseluruhan, peningkatan PDRB ADHK di seluruh wilayah menunjukkan tren perkembangan ekonomi yang absolut di kawasan Gerbangkertosusila. Namun demikian, ditemukan jurang yang cukup besar antarwilayah, terutama antara Kota Surabaya dengan kabupaten/kota lainnya. Perbedaan nilai PDRB tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di beberapa daerah tertentu. Apabila hasil pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti dengan pemerataan kesempatan kerja, investasi, dan distribusi pendapatan, maka kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan antarwilayah di kawasan Gerbangkertosusila.

Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Pengangguran berkontribusi terhadap pelebaran kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan besar dengan daerah yang lebih kecil. Peningkatan angka pengangguran cenderung akan memperburuk disparitas pendapatan karena semakin banyak individu yang tidak memperoleh sumber penghasilan. Sebaliknya, penurunan tingkat pengangguran berpotensi dalam mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan antar masyarakat (Anfa dan Bintariningtyas, 2022).



Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Gerbangkertosusila

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 hingga 2025, seluruh wilayah Kawasan Gerbangkertosusila menunjukkan adanya tren penurunan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, angka tingkat

pengangguran terbuka teratas berada pada wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan angka 10,87% dan Kota Surabaya sebesar 9,68%. Tingginya tingkat pengangguran tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menimbulkan penurunan kegiatan ekonomi, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi terbatas. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024 tingkat pengangguran seluruh kabupaten/kota pada Kawasan Gerbangkertosusila meniti penyusutan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian. Penurunan TPT pada seluruh wilayah tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja pada Kawasan Gerbangkertosusila, namun ketidakseimbangan antar daerah tetap menunjukkan adanya variasi dalam kapasitas menyerap tenaga kerja.

Di samping pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, upah minimum juga menjadi salah satu aspek yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan. sebagai kebijakan pemerintah, upah minimum ditetapkan untuk mengayomi pekerja meraup gaji yang sesuai dengan kepentingan hidup memadai. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga daya beli masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya pada kelompok pekerja yang berpendapatan rendah. Maka dari itu, upah minimum menjadi salah satu instrumen kebijakan yang berfungsi dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan tingkat ketimpangan di suatu wilayah (Putri and Hanifa, 2024).

Peningkatan nilai upah minimum berpotensi memperbaiki distribusi pendapatan karena kelompok pekerja dengan tingkat pendapatan yang rendah akan mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Kondisi tersebut dapat mempersempit kesenjangan pendapatan sehingga ketimpangan cenderung menurun. Namun demikian, apabila kenaikan upah

tidak diikuti dengan pemerataan kesempatan kerja atau hanya dinikmati oleh segelintir pekerja, maka manfaat kebijakan tersebut tidak akan dirasakan secara merata dan justru berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan (Putri and Hanifa, 2024).

Selain berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan, upah minimum juga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Upah minimum mencerminkan besarnya pendapatan minimum yang diterima para pekerja untuk menyanggupi kepentingan hidup sehari-hari. Dengan adanya peningkatan upah minimum, kemampuan pekerja dalam memenuhi keperluan hidup layak akan meningkat sehingga standar kesejahteraan masyarakat juga diharapkan mengalami perbaikan (Mudana and Purbadharmaja, 2024). Oleh karena itu, prosedur upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung terciptanya pemerataan dalam distribusi pendapatan.

Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum, belanja daerah juga merupakan sebuah elemen yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan penyediaan layanan publik. Apabila dialokasikan secara efektif pada sektor-sektor produktif, belanja daerah berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, dan mendorong pemerataan hasil pembangunan. Dengan demikian, belanja daerah mempunyai kapasitas krusial dalam mengurangi

kesenjangan antardaerah maupun antarmasyarakat sehingga dapat menekan tingkat ketimpangan pendapatan (Cahyono and Putri, 2017).

Oleh karena itu, pemahaman mengenai dinamika ekonomi antarwilayah menjadi penting dalam menjelaskan perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan. Berbagai faktor ekonomi, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), upah minimum, serta belanja daerah, diduga memiliki peran dalam memengaruhi distribusi pendapatan antarmasyarakat maupun antarwilayah. Perbedaan kondisi ekonomi, kesempatan kerja, tingkat upah, serta alokasi belanja pemerintah pada masing-masing daerah dapat menyebabkan variasi tingkat ketimpangan pendapatan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas sejumlah faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum dan belanja daerah namun penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh PDRB, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum dan belanja daerah terhadap tingkat ketimpangan pendapatan pada Kawasan Gerbangkertosusila dengan menggunakan data periode 2010 hingga 2025 masih terbatas. Oleh karena itu, observasi ini penting dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih menyeluruh mengenai komponen yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada Kawasan Gerbangketosusila.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada uraian latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila?
3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila?
4. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila
2. Untuk memahami bagaimana pengaruh dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila.
3. Untuk memahami bagaimana pengaruh dari Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila.
4. Untuk memahami bagaimana pengaruh dari Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan penelitian ini difokuskan pada analisis ketimpangan pendapatan yang diukur dengan menggunakan Indeks Gini Rasio. Variabel bebas yang dikaji terdiri atas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum dan Belanja Daerah. Wilayah yang dipakai adalah keseluruhan kabupaten/kota pada Kawasan Gerbangkertosusila.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan wawasan mengenai pengaruh PDRB, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum dan belanja daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, lingkup penelitian hanya difokuskan pada satu wilayah metropolitan, yaitu Gerbangkertosusila tanpa menggunakan kawasan lain sebagai pembanding. Kedua, penelitian ini tidak memasukkan faktor lain di luar variabel yang telah ditentukan.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diinginkan dapat membagikan faedah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, riset ini diinginkan dapat mempersembahkan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang bersinggungan dengan ketimpangan pendapatan antarwilayah. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian empiris mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum dan Belanja

Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan. Temuan dalam riset ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu pemerataan distribusi pendapatan di tingkat regional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Riset ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam upaya menekan ketimpangan pendapatan di wilayah Gerbangkertosusila. Hasil observasi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar guna mempersiapkan program penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja.

b. Bagi Akademisi

Riset ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan kajian ilmiah yang relevan dalam bidang ekonomi pembangunan, terutama yang berkaitan dengan analisis ketimpangan pendapatan menggunakan pendekatan data panel